

**Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemandirian Daerah Sebagai
Variabel Mediasi pada Kabupaten/Kota Provinsi Nusa
Tenggara Barat Tahun 2017-2023**

Dima Dwiyana Halil, Baiq Ismiwati, Iwan Harsono

Universitas Mataram, Universitas Mataram

dimadwyna@gmail.com, ismiwati2010@gmail.com, iwanharsono@unram.ac.id

ABSTRACT.

Regional economic growth is highly dependent on the capacity of local governments to manage their own revenues, particularly through the optimization of local taxes and levies. However, in West Nusa Tenggara Province, the level of regional independence still faces challenges due to the dominant role of transfer funds from the central government in the regional revenue structure. This study aims to analyze the effect of local taxes and levies on economic growth with regional independence as an intervening variable. This study uses a quantitative approach with an associative method and utilizes secondary data sourced from government financial reports. There are 70 observations in this study obtained from panel data of districts/cities in West Nusa Tenggara Province during the research period. Data analysis was performed using path analysis with the help of EViews software, and the regression model used was the Fixed Effect Model (FEM). Hypothesis testing included t-tests, F-tests, adjusted R-squared, and Sobel tests to examine the mediating role. The results showed that local taxes had a significant effect on regional autonomy and economic growth. Local levies did not have a significant effect on regional autonomy but had a significant effect on economic growth. Regional autonomy did not have a significant effect on economic growth. Based on the Sobel test, the results show that regional autonomy is unable to mediate the influence of regional taxes and levies on economic growth. This finding indicates that regional economic growth is still more influenced by factors other than regional fiscal autonomy.

Keywords: Local Taxes, Local Retributions, Regional Financial Independence, Economic Growth.

ABSTRAK.

Pertumbuhan ekonomi daerah sangat bergantung pada kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan secara mandiri, khususnya melalui optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah. Namun, di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tingkat kemandirian daerah masih menghadapi tantangan akibat dominannya peran dana transfer dari pemerintah pusat dalam struktur pendapatan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dengan kemandirian daerah sebagai variabel intervening. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif dan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan pemerintahan. Jumlah observasi dalam penelitian ini sebanyak 70 observasi yang diperoleh dari data panel kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan analisis jalur dengan bantuan perangkat lunak EViews, model regresi yang digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM). Pengujian

hipotesis meliputi uji t, uji F, adjusted R-square, dan uji Sobel untuk menguji peran mediasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian daerah dan pertumbuhan ekonomi. Retribusi daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian daerah tetapi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemandirian daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan uji Sobel diperoleh hasil bahwa kemandirian daerah tidak mampu memediasi pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah masih lebih dipengaruhi oleh faktor lain di luar kemandirian fiskal daerah.

Kata kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Kemandirian Daerah, Pertumbuhan Ekonomi.

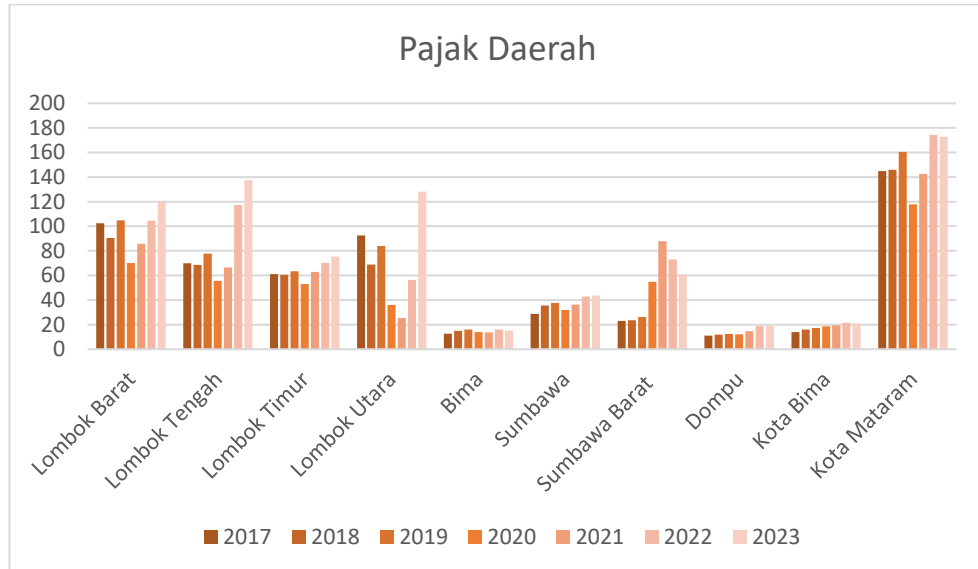
PENDAHULUAN

Perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi menyebabkan pemerintah daerah di Indonesia memiliki kesempatan dan keleluasaan dalam menyelenggarakan otonomi daerahnya (Rifai & Priono, 2022). Melalui desentralisasi, pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih besar untuk menyesuaikan kebijakan fiskal dengan preferensi masyarakat dan kondisi ekonomi lokal (Martinez-Vazquez & McNab, 2003). Desentralisasi diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan mereka sendiri (Fitriah & Suryaningrum, 2023). Menurut Undang-Undang No.34 Tahun 2000, sumber PAD yang paling penting guna membiayai penyelenggaraan dan Pembangunan untuk menetapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak daerah merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan penting dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sumber pajak daerah didominasi oleh pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, serta pajak rokok (Bappenda NTB, 2023). Meskipun pajak daerah menjadi penyumbang terbesar PAD, penerimaannya masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan basis pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak, serta ketergantungan pada sektor-sektor tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi pajak daerah tidak hanya bergantung pada pertumbuhan aktivitas ekonomi, tetapi juga pada efektivitas administrasi perpajakan daerah dan kebijakan intensifikasi serta ekstensifikasi pajak yang diterapkan oleh pemerintah daerah.

Gambar 1. Diagram Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017-2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, diolah 2025.



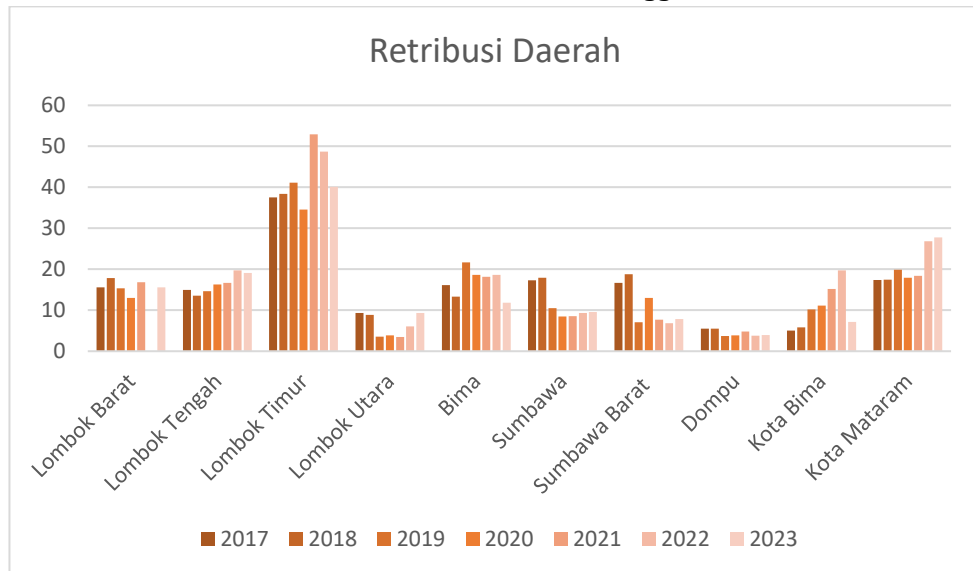
Berdasarkan gambar 1, penerimaan pajak daerah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) selama periode 2017-2023 menunjukkan adanya tren peningkatan yang bervariasi antar wilayah. Secara umum, grafik ini mengindikasikan masih adanya ketimpangan penerimaan pajak antar wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kabupaten/Kota dengan aktivitas ekonomi tinggi seperti Kabupaten Lombok Tengah dan Kota Mataram cenderung memiliki kemampuan fiskal lebih baik sedangkan daerah seperti Bima, Dompu, dan Kota Bima mencatat penerimaan pajak yang jauh lebih rendah dan cenderung stagnan. Kondisi ini menggambarkan bahwa kemandirian fiskal daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat masih belum merata. Keadaan ini sangat dipengaruhi oleh potensi ekonomi lokal dari masing-masing kabupaten/kota serta efektivitas pengelolaan pajak daerah.

Penerimaan retribusi di Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan komponen penting dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari beberapa pungutan, adapun pungutan retribusi yang umum di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu layanan parkir yang sudah tersebar di banyak lokasi seperti kawasan wisata dan ruang publik, kemudian layanan pemanfaatan fasilitas pasar daerah yang dikelola oleh pemerintah yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebaran retribusi daerah dapat dilihat pada gambar 2.

Gambar 2. Diagram Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017-2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, diolah 2025.



Berdasarkan gambar 2, dapat disimpulkan bahwa penerimaan retribusi daerah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tahun 2017–2023 masih relatif kecil. Kabupaten Lombok Timur menjadi daerah dengan penerimaan retribusi tertinggi, sedangkan Kabupaten Dompu menunjukkan penerimaan retribusi yang paling rendah. Secara keseluruhan, grafik menunjukkan bahwa penerimaan retribusi daerah di NTB masih rendah dan belum optimal. Hal ini dikarenakan keterbatasan kemandirian fiskal daerah, khususnya dalam membiayai pelayanan publik dan pembangunan daerah tanpa bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.

Pajak daerah dan retribusi daerah tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan utama, tetapi juga memperkuat kapasitas fiskal yang memungkinkan peningkatan belanja publik dan pembangunan infrastruktur, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan (Riza et al., 2018). Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lutfiona Riandhani et al., 2024), dimana pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) perekonomian daerah diklasifikasikan ke dalam 17 sektor lapangan usaha yang mencerminkan aktivitas ekonomi yang berkembang di suatu wilayah. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sektor sektor seperti pertanian, kehutanan dan perikanan, penyediaan akomodasi dan makan minum, perdagangan besar dan eceran serta real estat merupakan sektor yang secara konseptual memiliki keterkaitan langsung dengan potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi daerah. Keanekaragaman potensi tersebut memberikan peluang besar bagi pemerintah daerah untuk

meningkatkan pendapatan asli daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi regional.

Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017-2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, diolah 2025.

Kab/Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Lombok Barat	6.54%	0,57%	3,84%	-7,03%	3,40%	3,46%	3%
Lombok Tengah	6.43%	3,14%	4,04%	-6,67%	4,03%	3,55%	5,77%
Lombok Timur	6.25%	3.40%	4,70%	-3,12%	3,12%	3,18%	4,31%
Lombok Utara	5.22%	-0.87%	5,86%	-7,46%	1,38%	3,49%	5,10%
Bima	6.27%	4.04%	4,26%	-3,53%	1,79%	2,83%	3,93%
Sumbawa	6.86%	4.16%	4,86%	-4,13%	1,87%	3,21%	3,61%
Sumbawa Barat	-19,41%	-34.57%	-1,15%	28,79%	-0,33%	24,14%	-10,37%
Dompu	6.75%	4.38%	4,46%	-3,21%	1,68%	2,95%	3,17%
Kota Bima	6.65%	4.70%	5,15%	-4,95%	2,08%	2,83%	5,16%
Kota Mataram	8.07%	4.95%	5,58%	-5,52%	3,27%	3,53%	4,51%

Tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat dari tahun 2017-2023 mengalami variasi yang cukup signifikan. Terjadi kontraksi ekonomi yang cukup dalam pada tahun 2020 di hampir semua wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat akibat dampak pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 mulai terlihat adanya pemulihan ekonomi dengan kembalinya pertumbuhan ke angka positif meskipun masih terbatas. Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak hanya mencerminkan dinamika Pembangunan, tetapi juga menjadi factor penting dalam meningkatkan kemandirian fiskal (Tolosang, 2018). Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat memperkuat kemandirian fiskal yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi (Yu et al., 2023).

Dari pemaparan tersebut, dapat dikatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, namun efektivitas pengaruhnya sangat dipengaruhi oleh tingkat kemandirian fiskal daerah. Meskipun berbagai penelitian menemukan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, hasil penelitian terkait peran kemandirian daerah sebagai variabel mediasi masih menunjukkan inkonsistensi. Sebagian studi menemukan kemandirian daerah memperkuat pengaruh Pad terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara penelitian lain menunjukkan tidak adanya efek mediasi yang signifikan. Selain itu, penelitian empiris pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat masih terbatas.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian peran kemandirian daerah sebagai variabel intervening dalam model dua sub-struktural berbasis data panel pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga memberikan bukti empiris yang lebih spesifik mengenai hubungan fiskal daerah dan pertumbuhan ekonomi di tingkat regional. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk

menganalisis pengaruh dari pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemandirian daerah sebagai variabel intervening pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari dan mengetahui hubungan dan kaitan antara suatu variabel atau lebih dengan variabel lainnya. Lokasi dalam penelitian ini adalah 10 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), waktu penelitian mencakup periode tahun 2017–2023. Jumlah observasi dalam penelitian ini sebanyak 70 observasi yang diperoleh dari data balanced panel kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2017-2023. Sumber data menggunakan data sekunder berupa realisasi pajak daerah, retribusi daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer, dan data pertumbuhan ekonomi dari laman resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan dan publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS).

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan path analysis (analisis jalur), yaitu metode statistik yang digunakan untuk mengukur hubungan sebab-akibat antar variabel yang meliputi pengaruh langsung maupun tidak langsung dalam sebuah model struktural. Path analysis merupakan pengembangan dari regresi linier berganda yang memungkinkan peneliti menguji variabel mediasi atau intervening sehingga dapat diketahui peran perantara dalam suatu sistem hubungan kausal (Ghozali, 2016).

Menyusun Model Struktural

Tahap pertama dalam menggunakan analisis jalur (path analysis) adalah menyusun model struktural yang menggambarkan hubungan kausal antarvariabel berdasarkan teori yang relevan. Dalam penelitian ini terdapat perbedaan satuan pengukuran antarvariabel, yaitu Pajak Daerah (X_1) dan Retribusi Daerah (X_2) dalam satuan rupiah sebagai variabel independen, Kemandirian Daerah (Z) dalam satuan persen sebagai variabel intervening dan Pertumbuhan Ekonomi (Y) dalam satuan persen sebagai variabel dependen. Transformasi logaritma natural (\ln) tidak dilakukan dikarenakan karakteristik data yang mengandung nilai nol dan negative pada variabel Pertumbuhan Ekonomi (Y) sehingga secara matematis fungsi logaritma tidak dapat diterapkan, selain itu perbedaan satuan pengukuran antarvariabel tidak menjadi hambatan karena model regresi linear tidak mensyaratkan keseragaman satuan antarvariabel (Gujarati & Porter, 2009). Selama model regresi memenuhi asumsi klasik, penggunaan data dalam skala asli tetap memberikan hasil estimasi yang sah (Stock & Watson, 2015).

Oleh karena itu, penelitian ini mempertahankan seluruh variabel dalam bentuk skala asli guna menjaga keutuhan data serta mempermudah interpretasi

koefisien regresi dalam konteks kebijakan ekonomi yang dianalisis. Secara konseptual, model struktural tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Sub Structural 1 = Pengaruh Variabel X_1 dan X_2 terhadap Variabel Z.

Secara matematis, hubungan tersebut dapat dirumuskan dalam persamaan regresi sebagai berikut:

$$Z = a_1 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon_1$$

Keterangan :

Z = Kemandirian Daerah (%)

X_1 = Pajak daerah (Rp.)

X_2 = Retribusi daerah (Rp.)

a_1 = Konstanta

β_1, β_2 = Koefisien Regresi

b. Sub Structural 2 = Pengaruh Variabel X_1 , X_2 , dan Z terhadap Variabel Y.

Secara matematis, persamaan regresi dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = a_2 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 Z + \varepsilon_1$$

Keterangan :

Y = Pertumbuhan Ekonomi (%)

X_1 = Pajak daerah (Rp.)

X_2 = Retribusi daerah (Rp.)

Z = Kemandirian Daerah (%)

a_2 = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien Regresi

Pemilihan Model Regresi

Regresi panel memiliki tiga kemungkinan model, yaitu Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). Pemilihan model dilakukan agar estimasi koefisien regresi menghasilkan nilai yang paling efisien, tidak bias, dan sesuai dengan karakteristik data yang digunakan. Untuk memilih model terbaik, ada tiga uji statistic yang dilakukan sebagai prosedur pemilihan model panel, yaitu sebagai berikut :

a. Uji Chow (CEM vs FEM).

Uji ini digunakan untuk menentukan model terbaik antara Common Effect Model dan Fixed Effect Model. Jika nilai probability < 0.05, maka FEM adalah model terbaik; sebaliknya jika > 0.05, maka CEM yang digunakan.

b. Uji Hausman (FEM vs REM).

Uji ini digunakan untuk memilih antara Fixed Effect Model dan Random Effect Model. Jika probability < 0.05, maka FEM dipilih; jika > 0.05, maka REM lebih tepat digunakan.

c. Uji Lagrange Multiplier – LM Test (CEM vs REM).

Uji ini dilakukan apabila pada Uji Chow model yang dipilih adalah CEM, namun tetap perlu dibandingkan dengan REM. Jika probability < 0.05, maka REM dipilih; jika > 0.05, maka CEM yang digunakan.

Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian data panel, penerapan uji asumsi klasik tidak sepenuhnya sama dengan regresi OLS konvensional. Menurut Gujarati dan Porter (2009), uji asumsi klasik diperlukan terutama pada model berbasis OLS, sedangkan pada model Fixed Effect dan Random Effect uji normalitas residual tidak menjadi keharusan. Namun demikian, potensi heteroskedastisitas dan autokorelasi tetap perlu diperhatikan, sehingga penggunaan standar error yang robust direkomendasikan (Baltagi, 2013).

Uji Hipotesis

Uji T (Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh antar variabel, pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen (N. E. Putri et al., 2025). Apabila nilai signifikansi (Sig.) < 0,05 maka variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial.

Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel dependen. Apabila nilai signifikansi (Sig.) < 0,05 maka variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Uji Koefisien Determinan (R²).

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi perubahan pada variabel dependen. Nilai R² berada antara 0 sampai 1. Semakin besar nilai R² mendekati 1, maka semakin kuat kontribusi variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

Uji Sobel (Sobel Test)

Pengujian hipotesis intervening dapat dilakukan dengan prosedur yang dikembangkan oleh Sobel (1982) dan dikenal dengan Uji Sobel (Sobel Test). Uji Sobel adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji apakah suatu variabel mediasi secara signifikan memediasi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen (Wardhana & Khristiana, 2024).

Uji ini menghitung seberapa besar pengaruh tidak langsung dari variabel X terhadap variabel Y melalui variabel Z (mediasi). Uji Sobel dilakukan dengan menggunakan nilai koefisien regresi dan standard error dari pengaruh X→Z (a) dan Z→Y (b). Nilai-nilai tersebut dimasukkan dalam rumus Sobel untuk menghasilkan nilai Z hitung yang kemudian dibandingkan dengan nilai Z tabel. Jika Z hitung lebih besar dari Z tabel (umumnya 1.96 untuk signifikansi 5%), maka efek mediasi dinyatakan signifikan. Adapun rumus yang digunakan adalah :

$$t = \frac{ab}{\sqrt{(b^2SEa^2) + (a^2SEb^2)}}$$

Ket :

a = jalur variabel independent terhadap variabel intervening

b = jalur variable intervening terhadap variabel dependen

SE = standar error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Pemilihan Model

- Sub Structural 1 (Pengaruh X1 dan X2 terhadap Z)

Berdasarkan hasil pengujian Uji Chow diperoleh nilai probabilitas (Prob. Cross-section F / Chi-square) yaitu $0.0000 < 5\%$ ($\alpha = 0,05$), berarti model yang dipilih adalah Fixed Effect Model (FEM). Kemudian, berdasarkan hasil Uji Hausman, diperoleh nilai probabilitas yaitu $0.0070 < 5\%$ ($\alpha = 0,05$). Dengan demikian, model yang paling tepat digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM).

- Sub Structural 2 (Pengaruh X1, X2 dan Z terhadap Y).

Berdasarkan hasil pengujian Uji Chow, diperoleh nilai probabilitas (Prob. Cross-section F / Chi-square) yaitu $0.03518 < 5\%$ ($\alpha = 0,05$), berarti model yang dipilih adalah Fixed Effect Model (FEM). Kemudian, berdasarkan hasil Uji Hausman, diperoleh nilai probabilitas yaitu $0.0022 < 5\%$ ($\alpha = 0,05$). Dengan demikian, model yang paling tepat digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM).

Hasil Uji Asumsi Klasik

- Sub Structural 1 (Pengaruh X1 dan X2 terhadap Z)

Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient		Centered VIF
	Uncentered Variance	VIF	
C	3.067231	26.00115	NA
X1	0.000396	13.13393	1.033126
X2	0.008835	19.25079	1.033126

Berdasarkan hasil pengujian, seluruh variabel independen memiliki nilai Centered VIF yang rendah dan berada jauh di bawah batas kritis (10), sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami permasalahan multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas, diperoleh nilai probabilitas pada X1 = 0.5007 dan X2 = 0.1078, artinya model regresi terbebas dari gejala

heteroskedastisitas sehingga koefisien regresi yang dihasilkan dapat diinterpretasikan secara valid.

- Sub Structural 2 (Pengaruh X1, X2 dan Z terhadap Y).

Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient		Centered
	Variance	VIF	VIF
C	33.72480	45.03078	NA
Z	0.109461	42.23223	1.212209
X1	0.002916	15.24177	1.198930
X2	0.057385	19.69564	1.057000

Berdasarkan hasil pengujian, seluruh variabel independen memiliki nilai Centered VIF yang rendah dan berada jauh di bawah batas kritis (10), sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami permasalahan multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas, diperoleh nilai probabilitas pada $X1 = 0.2883$ dan $X2 = 0.0881$, dan $Z = 0.6292$ artinya model regresi terbebas dari gejala heteroskedastisitas sehingga koefisien regresi yang dihasilkan dapat diinterpretasikan secara valid.

Hasil Uji Hipotesis

- Sub Structural 1 (Pengaruh X1 dan X2 terhadap Z)

Uji T (Parsial)

Variable	Coefficien			
	t	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	11.41054	1.751351	6.515276	0.0000
X1	0.060693	0.019893	3.050946	0.0034
X2	0.108815	0.093993	1.157699	0.2517

Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel X1 memiliki nilai probabilitas sebesar $0,0034 < 5\%$ ($\alpha = 0,05$). Ini berarti bahwa secara parsial variable X1 memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variable Z. Selanjutnya, hasil pengujian X2 menunjukkan nilai probabilitas sebesar $0,2517 > 5\%$ ($\alpha = 0,05$). Hasil ini menunjukkan bahwa secara parsial, variable X2 tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variable Z.

Uji F (Simultan)

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

			0.92776
Root MSE	2.615718	R-squared	1
Mean dependent var			0.91406
var	16.75286	Adjusted R-squared	0
			2.87359
S.D. dependent var	9.802317	S.E. of regression	8
Akaike info criterion	5.103812	Sum squared resid	7
			-
			166.633
Schwarz criterion	5.489268	Log likelihood	4
Hannan-Quinn criter.	5.256919	F-statistic	4
Durbin-Watson stat	1.789305	Prob(F-statistic)	0

Berdasarkan hasil regresi, diperoleh nilai Prob(F-statistic) sebesar $0,000000 < 5\%$ ($\alpha = 0,05$). Hasil ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel X1 dan X2 mampu menjelaskan variasi perubahan pada variabel Z secara signifikan.

Uji R-Squared

Berdasarkan hasil estimasi regresi panel, diperoleh nilai Adjusted R-Square sebesar 0,914060. Nilai ini menunjukkan bahwa sebesar 91,41% variasi perubahan pada variabel Z dapat dijelaskan oleh variabel independen X1 dan X2 yang digunakan dalam model penelitian. Sementara itu, sisanya sebesar 8,59% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.

- Sub Structural 2 (Pengaruh X1, X2 dan Z terhadap Y).

Uji T (Parsial)

Variable	Coefficien			
	t	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-5.362561	5.793309	-0.925647	0.3585
X1	0.173409	0.053867	3.219224	0.0021
X2	-0.503536	0.238974	-2.107076	0.0395
Z	0.307038	0.330051	0.930275	0.3562

Berdasarkan hasil regresi, variabel X1 nilai probabilitas sebesar $0,0021 < 5\%$ ($\alpha = 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variable X1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap variable Y. Variable X2 menunjukkan nilai probabilitas sebesar $0,0395 < 5\%$ ($\alpha = 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variable X2 berpengaruh signifikan terhadap Y namun arahnya negatif. Sedangkan, variable Z menunjukkan nilai probabilitas sebesar $0,3562 > 5\%$ ($\alpha = 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa variable Z tidak berpengaruh terhadap variable Y.

Uji F (Simultan)

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)			
			0.26203
Root MSE	6.517926	R-squared	8
Mean dependent var			0.10667
var	2.342571	Adjusted R-squared	8
			7.22305
S.D. dependent var	7.642175	S.E. of regression	7
Akaike info criterion	6.958418	Sum squared resid	5
			-
			230.544
Schwarz criterion	7.375996	Log likelihood	6
Hannan-Quinn criter.	7.124285	F-statistic	9
Durbin-Watson stat	2.437690	Prob(F-statistic)	0

Berdasarkan hasil regresi, diperoleh nilai Prob(F-statistic) sebesar $0,094170 > 5\%$ ($\alpha = 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel X1, X2, dan Z belum mampu menjelaskan perubahan variable Y secara signifikan. Hasil ini konsisten dengan beberapa studi empiris di Indonesia yang menemukan bahwa kontribusi pajak dan retribusi masih belum cukup kuat secara statistik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kemandirian daerah memerlukan waktu dan konteks pembangunan yang luas agar dapat berdampak signifikan terhadap perekonomian, sehingga dalam periode penelitian ini efeknya belum tampak secara signifikan. Faktor-faktor lain seperti investasi, infrastruktur, dan kualitas pemerintahan kemungkinan lebih dominan memengaruhi pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Uji R-Squared

Berdasarkan hasil estimasi regresi panel, diperoleh nilai Adjusted R-Square sebesar 0,106678. Nilai ini menunjukkan bahwa sebesar 10,67% variasi perubahan pada variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel independen X1, X2 dan Z yang digunakan dalam model penelitian. Sementara itu, sisanya sebesar 89,33% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. Nilai koefisien determinasi (R^2) dalam penelitian ini relatif rendah dikarenakan variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural dan makroekonomi yang tidak seluruhnya dimasukkan dalam model, antara lain belanja modal, investasi, kemajuan teknologi, tenaga kerja, dan lain sebagainya.

Uji Sobel (Sobel test)

- Variabel X1 terhadap variable Y melalui Variabel Z

$$t = \frac{ab}{\sqrt{(b^2SEa^2) + (a^2SEb^2)}}$$
$$t = \frac{0,060693 \times 0,307038}{\sqrt{(0,307038^2 \times 0,019893^2) + (0,060693^2 \times 0,330051^2)}}$$
$$t = \frac{0,01864}{0,02094}$$
$$t = 0,89$$

Nilai t hitung (0,89) lebih kecil dari nilai t table (1,66). Hal ini berarti variable Pajak Daerah (x1) tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi (y) melalui Kemandirian Daerah (z).

- Variabel X2 terhadap variable Y melalui Variabel Z

$$t = \frac{ab}{\sqrt{(b^2SEa^2) + (a^2SEb^2)}}$$
$$t = \frac{0,108815 \times 0,307038}{\sqrt{(0,307038^2 \times 0,093993^2) + (0,108815^2 \times 0,330051^2)}}$$
$$t = \frac{0,03341}{0,04610}$$
$$t = 0,72$$

Nilai t hitung (0,72) lebih kecil dari nilai t table (1,66). Hal ini berarti variable Retribusi Daerah (x2) tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi (y) melalui Kemandirian Daerah (z).

Pembahasan

1. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Daerah. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi tingkat kemandirian daerah. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Balqis et al., 2018) yang menjelaskan bahwa pajak daerah jika secara simultan dengan retribusi daerah, menjadi dua variabel yang secara signifikan mampu mempengaruhi tingkat kemandirian

keuangan daerah, karena kedua PAD ini menjadi faktor yang paling penting untuk sebuah daerah apabila menginginkan kemandirian keuangan daerahnya meningkat. Secara parsial, hasil uji t mengindikasikan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian daerah. Namun, retribusi daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian daerah. Hasil penelitian sejalan dengan yang telah dilakukan oleh (Khasanah & Susilowati, 2025) yang menunjukkan bahwa hasil bertentangan dengan teori Hessel Nogi S. yang menyatakan kemampuan dinas pendapatan daerah dapat mempengaruhi kemandirian daerah. Secara teoritis, kemandirian daerah diukur dari kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pengeluaran melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), sementara penerimaan retribusi daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki kontribusi yang relatif kecil dibandingkan komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya seperti pajak daerah. Dengan proporsi yang terbatas, peningkatan retribusi tidak secara substansial meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

2. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Kemandirian Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dan kemandirian daerah tidak memiliki pengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara parsial, pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini sesuai dengan penelitian oleh (Miswara et al., 2021) yang menyatakan bahwa apabila penerimaan pemerintah daerah meningkat daya beli masyarakat juga meningkat dan hal inilah yang meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi. Begitu juga dengan Retribusi Daerah, jika fasilitas prasarana yang tersedia baik maka akan mendorong investor untuk meningkatkan usaha di daerah tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan penerimaan pajak dan retribusi tidak hanya meningkatkan kapasitas fiskal daerah, tetapi juga mendorong aktivitas ekonomi melalui pembiayaan pembangunan, penyediaan infrastruktur, serta peningkatan kualitas layanan publik.

Sedangkan kemandirian daerah tidak menunjukkan pengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini bertentangan dengan penelitian oleh (Suci & Asmara, 2014) yang menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah akan berimplikasi pada kenaikan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat terjadi karena Pendapatan Asli Daerah yang masih kecil dibandingkan dengan dana transfer dari pemerintah pusat (DAU, DBH, DAK). Akibatnya, kemampuan mandiri daerah belum cukup untuk memicu pertumbuhan ekonomi yang nyata.

3. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Kemandirian Daerah.

Berdasarkan hasil uji Sobel, diketahui bahwa kemandirian daerah belum mampu memediasi pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai statistik Sobel yang diperoleh berada di bawah nilai kritis, sehingga pengaruh tidak langsung pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan

ekonomi melalui kemandirian daerah dinyatakan tidak signifikan. Hal ini dapat terjadi karena selama periode 2017–2023 struktur pendapatan daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat masih sangat bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat, sehingga kontribusi penerimaan asli daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi belum cukup kuat untuk mendorong kemandirian fiskal secara signifikan. Akibatnya, variabilitas pajak dan retribusi tidak cukup memengaruhi kemampuan daerah dalam mengambil keputusan investasi dan pengeluaran yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, peran kemandirian daerah sebagai mediasi menjadi tidak signifikan karena faktor dominan transfer pusat masih menyusun basis utama pertumbuhan ekonomi di NTB selama periode penelitian. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan (Panigoro, Aulia, Anderson G, & N, 2023), yang menyatakan kemandirian daerah tidak dapat memediasi hubungan antara pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Manado yang disebabkan karena pemerintah sangat bergantung dan berharap pada aliran dana transfer pusat sehingga kontribusi dan pengaruh pajak daerah maupun retribusi daerah terhadap pembiayaan Pembangunan di daerah tersebut masih sangat minim.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah berperan signifikan dalam meningkatkan kemandirian daerah, sementara retribusi daerah belum memberikan pengaruh yang signifikan. Selain itu, pajak daerah dan retribusi daerah secara parsial berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, namun kemandirian daerah tidak mampu memediasi hubungan tersebut. Hasil uji Sobel mengindikasikan bahwa kemandirian fiskal daerah belum berfungsi optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga diperlukan pengelolaan penerimaan dan belanja daerah yang lebih produktif agar dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi lebih nyata.

Dengan demikian, meskipun pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap kemandirian daerah, serta memiliki pengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, kemandirian daerah tidak berperan sebagai variabel intervening dalam hubungan tersebut.

Saran

Pemerintah daerah disarankan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah melalui peningkatan kepatuhan dan perbaikan sistem administrasi perpajakan. Selain itu, pengelolaan retribusi daerah perlu dievaluasi agar lebih efektif dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik. Pemerintah daerah juga diharapkan mengarahkan belanja daerah pada sektor-sektor produktif guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu memperkuat kemandirian daerah melalui peningkatan proporsi PAD, perbaikan pengelolaan keuangan daerah, dan pengurangan ketergantungan terhadap dana

transfer pusat. Penguatan kemandirian daerah ini penting agar daerah memiliki ruang fiskal yang lebih besar dalam menentukan kebijakan pembangunan dan mampu berkontribusi secara lebih efektif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang secara teoritis memiliki pengaruh lebih kuat terhadap pertumbuhan ekonomi, seperti investasi, belanja modal pemerintah, tingkat pendidikan, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Serta menggunakan periode dan metode analisis yang lebih beragam agar memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amal, & Wibowo. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Dki Jakarta Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19. *MIZANIA: Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi*, 4(1), 83–93. <https://doi.org/10.47776/mizania.v2i1.508>
- Anggela, T. R. (2019). Retribusi Daerah Sebagai Pendapatan Asli Daerah. *Prisma, November*, 1–8. tutrestuanggela@student.unsri.ac.id
- Anggoro, D. D. (2017). Pajak Daerah dan Retribusi daerah. UB Press. Davey, K. J. (1988). *Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya*
- Baltagi, B. H. (2013). *Econometric Analysis of Panel Data* (5th ed.). John Wiley & Sons.
- Balqis, M., Murdiati, S. and Amirah, M., (2018). "Pengaruh Penerapan Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Dan Aset Daerah (Dppkad) Eks Karesidenan Pekalongan Pada Tahun 2013–2017". dalam *Jurnal PERMANA*, hal 9(2).
- Dekhtyar, N., Valaskova, K., Deyneka, O., & Pihul, N. (2020). Assessment of the level of local budget financial decentralization : case of Ukraine. *Public and Municipal Finance*, 9(1), 34–47. [https://doi.org/10.21511/pmf.09\(1\).2020.04](https://doi.org/10.21511/pmf.09(1).2020.04)
- Digdowniseiso, K., W, N. P. L., & Andriani, F. (2023). Analisis Kemandirian Fiskal, Ketergantungan Fiskal, Dan Efektivitas Fiskal Provinsi Kalimantan Utara Periode 2017-2022. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 4(1), 127–137. <https://doi.org/10.55681/jige.v4i1.556>
- Fitriah, & Suryaningrum. (2023). Peran Mediasi Pertumbuhan Ekonomi pada Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Ketimpangan Pendapatan Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, 6(1). <https://doi.org/10.30596/jakk.v6i1.14720>
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. BP Undip.
- Ginting, N., & Irawan, F. (2022). Tinjauan kebijakan insentif pajak di masa pandemi COVID-19 berdasarkan fungsi budgetair dan regulereend pajak. *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1).
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics* (5th ed.). McGraw-Hill.
- Kharisma, B. (2013). Desentralisasi Fiskal Dan Pertumbuhan Ekonomi : Sebelum Dan Sesudah Era Desentralisasi Fiskal Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 14(2), 101–119.

- Khasanah, P. C., & Susilowati, L. (2025). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Daerah Di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2023. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 5(2), 747–758. <https://doi.org/10.37481/jmeh.v5i2.1338>
- Kusuma, H. (2016). Desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 9(1), 1–3.
- Lutfiona Riandhani, Puti Andiny, Yani Rizal, & Safuridar Safuridar. (2024). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan Pajak*, 1(4), 62–72. <https://doi.org/10.61132/jbep.v1i4.648>
- Martinez-Vazquez, J., & McNab, R. M. (2003). Fiscal decentralization and economic growth. *World Development*, 31(9), 1597–1616. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(03\)00109-8](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(03)00109-8)
- Melmambessy, D. (2022). *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA JAYAPURA DITINJAU DARI JURNAL EKONOMI & BISNIS Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura*. 13, 10–15.
- Miswara, Putri Yudistira Lianda, & Riha Dedi Priantana. (2021). 3726-Article Text-14077-2-10-20211001 (1). *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra (Jmas)*, 2, 153–169. <https://ejournalunsam.id/index.php/jmas/article/view/3726>
- Putri, B. N., & Septriana, I. (2020). Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya Melalui Pemeriksa Pajak, Kesadaran dan Kualitas Pelayanan pada KPP Pratama Semarang Barat. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*. <https://doi.org/10.33633/jpeb.v5i1.3229>
- Putri, N. E., Susandra, F., Melani, M. M., Hotel, P., & Daerah, P. A. (2025). Analisis Pengaruh Efektivitas , Efisiensi , dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2023). 3, 1–14.
- Rifai, A. D., & Priono, H. (2022). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(2), 434. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i2.556>
- Riza, F., Militina, T., & Wijaya, A. (2018). Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi. *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM)*, 3.
- Rusdiana, A. (2017). *Analisis Kemandirian Fiskal dalam Era Otonomi dan Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan*.
- Sekaran, & Bougie. (2016). *Research Methods for Business: A Skill Building Approach*.
- Stock, J. H., & Watson, M. W. (2015). *Introduction to Econometrics (3rd ed.)*. Pearson.
- Suci, S. C., & Asmara, A. (2014). PENGARUH KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA PROVINSI BANTEN. 3(2), 136–157.

- Sudarmana, I. P. A., & Sudiarta, G. M. (2020). Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 9(4), 1338. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2020.v09.i04.p06>
- Sulistiyawati, A. I., Illyasa, N., Santoso, A., Dwi Nugroho, A. H., & Gusmao, C. (2024). Kajian empiris faktor-faktor penentu kemandirian keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Indonesia (JABISI)*, 5(1), 23–35.
- Tolosang, K. D. (2018). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah kota tomohon. 18(03), 79–92.
- Wardhana, G. W., & Khristiana, Y. (2024). Dampak Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Laju Kemiskinan Di Indonesia: Analisis Sobel Test. 2833(Yacoub 2012), 203–211.
- Yasser, H., & Widajantie, T. D. (2022). PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI KASUS BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016 - 2020). *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(1), 611-619. <https://doi.org/10.31955/mea.v6i1.1887>
- Yuniarti, Wianti, W., & Nurgaheni, N. E. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisni Islam*, 2(1), 108–119. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i1.2089>
- Yu, Z., Wu, Y., & Zhu, Z. (2023). Fiscal Decentralization, Environmental Regulation and High-Quality Economic Development. *Sustainability (Switzerland)*, 15(10), 1–20. <https://doi.org/10.3390/su15107911>